

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI
Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunujuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260028, 4260029
Laman : www.ubb.ac.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 37/UN50.1.3.2/PI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sujadmi, S.Sos., M.A.
NIP : 198605152012122004
Jabatan : Ketua Program Studi Sosiologi

dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa atas nama:

Nama : Nuranisyah
Nim : 5011311059
Program Studi : Sosiologi

benar sedang melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul:

Gerakan Masyarakat Anti Kapal Isap Produksi (Studi Pada Penolakan Kapal Isap Produksi Di Perairan Pantai Matras Sungailiat)

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balunujuk, 25 Januari 2017
Pjs Ketua
Sujadmi
NIP198605152012122004

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk mempermudah peneliti mendapatkan data dalam penelitian ini, maka disusunlah daftar pertanyaan dengan tujuan agar jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut akan penulis jadikan sebagai data dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan adalah sebagai berikut:

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Tempat tinggal :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana awal kemunculan gerakan sosial penolakan KIP di perairan Pantai Matras?
2. Bagaimana proses penggabungan dalam melakukan gerakan sosial menolak masuknya KIP di perairan Pantai Matras?
3. Siapa saja yang ikut terlibat didalam gerakan sosial menolak KIP di perairan Pantai Matras?
4. Apa yang memotivasi anda ikut dalam gerakan sosial menolak masuknya KIP di perairan Pantai Matras?
5. Apakah ada organisasi yang terlibat dalam gerakan sosial menolak masuknya KIP di perairan Pantai Matras?

6. Strategi apa saja yang digunakan dalam menolak masuknya KIP di perairan Pantai Matras?
7. Apakah gerakan sosial dalam menolak masuknya KIP di perairan Pantai Matras berhasil?
8. Sumberdaya apa saja yang digunakan dalam gerakan sosial menolak masuknya KIP?
9. Bagaimana status gerakan sosial ini sekarang?



Lampiran 3

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Umur (tahun)	Tempat tinggal
1.	Fitri	45	Matras
2.	Samsul	55	Matras
3.	sarah	40	Matras
4.	Rizta	32	Matras
5.	Sirawati	70	Matras
6.	Ramzi	40	Air ruai
7.	Samsu	55	Sinar Baru
8.	Ikrar	27	Gudang Itam
9.	Ardi	26	Cendrawasih

Lampiran 4

Dokumentasi



Destinasi wisata Pantai Matras



Destinasi wisata Pantai Matras



Talud pemecah ombak dan tempat berlabuh perahu nelayan



Pantai Turun Aban



Pantai Tanjung Kelayang



Pantai Turun Aban dan tempat berlabuh perahu nelayan

Nelayan Matras Tegaskan Tolak KIP!

SUNGAILIAT - Masyarakat Nelayan Kelurahan Matras kembali melakukan aksi tolak masuknya Kapal Isap Pertimahan (KIP) di perairan laut Matras. Bertempat di pantai Teluk Matras sebagai tambahan perahu nelayan Matras, aksi dilakukan puluhan nelayan dengan memasang spanduk penolakan di berbagai tempat. Nelayan setempat merasa tempat mata pencahariannya terancam atas beredarnya informasi akan masuk kembali KIP.

"Yang diinginkan nelayan jelas, kami ini kan pekerjaannya di laut, jadi di laut ini maunya terbebas dari segala bentuk kerusakan sehingga kami pun dapat mencari nafkah di laut ini," sebut salah satu nelayan, Iwan yang 15 tahun menekuni profesi nelayan, di Pantai Teluk Matras, kemarin sore (12/11).

Iwan menuturkan, sejak masuk KIP di perairan tidak jauh dari Pantai Matras, hasil tangkap para nelayan drastis berkurang. Nelayan setempat yang biasa beroperasi pada laut dengan wilayah di bawah 4 mil harus kehilangan hasil melaut sampai 100 persen dari biasanya.

Sejak ada operasi KIP sekitar 90 hingga 100 persen hilangnya. Lumpurnya itu merusak terumbu karang, gak ada lagi ikan. Biasa tidak ada kapal isap, melimpah tangkapan kita di sini. Sebelumnya kalau kami nangkap cumi pas bulan terang bisa belasan kilo sama ikan juga. Setelah ada KIP ini berkurang, bahkan kami tidak lagi ke daerah yang ada kapal isapnya itu," keluh Iwan.

Ia bersama nelayan Matras lainnya hanya menggunakan perahu kecil dengan daya jangkau tangkap sekitar empat mil. Dan sejak awal masuknya KIP selalu melakukan penolakan. "Dari pertama duit masuk kami nolak, nelayan-nelayan di sini nolak," imbuhnya.

Sementara nelayan lainnya, H. Syamsu Budiman mengatakan, pihaknya kaget tentang informasi akan masuknya kembali KIP di perairan laut Matras. Apalagi sebelumnya sudah ada pertemuan dan diantaranya pertemuan dengan Kapolres Bangka yang kemudian dilanjutkan di Gedung Sepintu Sedulang. Hasil pertemuan itu tidak mengizinkan kapal isap masuk karena takut terjadi bentrokan antara nelayan kecil dan pengusaha KIP dan Polres tidak membiarkan hal itu terjadi.

Menurutnya, kalau dalam beberapa minggu ini terdengar ada isu kapal isap ingin masuk kembali di wilayah Matras, pihaknya yang notabene menolak tidak mengatahui karena tidak pernah dilibatkan untuk membicarakan hal-hal yang dilakukan pihak KIP. "Yang jelas seluruh nelayan di sini 90 lebih persen menolak, setahu saya. Mungkin ada juga yang kepengen mengizinkan, tapi 90 lebih persen menolak," tegasnya.

Budiman mengaku sudah merasakan dampak akibat tambang. Kini untuk melaut membutuhkan 30 liter bensin namun ikan yang didapat hanya satu ikan tenggiri.

Demikian juga untuk nelayan bagan tidak bisa menangkap ikan akibat air yang kotor dari aktivitas KIP. Sementara ini semuanya nolak, 90 lebih persen. Kalau rombongan kami tadi tidak ada mengizinkan. Saya berharap bahwa kapal isap itu jangan masuk lah di daerah Matras ini, karena kan banyak keluarga, dan nelayan yang menggantungkan hidup di laut. Termasuk saya walaupun beurn pure (murni) sebagai nelayan, tapi waktu-waktu saya sekarang ini banyak habis dilaut, disamping hobi juga mata pencaharian sekarang ini," tuturnya.

Apalagi semenjak ekonomi tidak menentu banyak masyarakat beralih ke laut untuk cari nafkah. Belum lagi ikan yang susah didapat masih di-ambah beli masyarakat yang murah.

Karena itu pihaknya masih men-jadikan hasil pertemuan Sepintu Sedulang sebagai acuan resmi. "Saya sepakat dengan hasil pertemuan di Sepintu sedulang, itu pertemuan resmi. Kalau belum ada pertemuan resmi lagi berarti mereka ingin main jago-jagoan jadi puncaknya ada tindakan anarkis siapa yang bertanggungjawab nanti, mudah-mudahan jangan terjadi. Tetapi kalau orang kecil lawan orang besar biasanya kan kalah orang kecil, cari kita menggunakan kekuatan yang kasar kan tidak mungkin," ujarnya.

"Jadi harusnya kita memolak dengan baik-baik, walaupun KIP itu diizin gubernur saya bilang kan bisa dibenarkan, karena iznnya itu sampai 2025. Kalau kita melakukan recovery di laut ini sampai 10 tahun tidak bisa, kita keuluan mati yang sering di laut ini, generasi kita selanjutnya yang akan menanggung," tutupnya. (mh)

Tolak KIP di Matras

NIAT PT Timah (Persero) Tbk untuk mengeksploitasi perairan laut Pantai Matras, Sungailiat, dengan menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP), tampaknya tetap ditolak warga. Hal itu terlihat dari alotnya sosialisasi yang digelar di Hotel Novilla Sungailiat, Sabtu (5/12).

MAYORITAS warga Kelurahan Matras, aktivis kepemudaan dan ormas menolak rencana masuknya KIP di dasar laut tersebut. Pantauan Babel Pos, jumlah yang melakukan penolakan KIP lebih banyak dibanding yang setuju.

Salah satu alasan penolakan datang dari organisasi kepemudaan, Pemuda Abdi Bangsa Bangka Belitung (Babel) yang menyatakan ada anugerah lain di Pantai Matras selain timah dan bisa berkelanjutan untuk dimanfaatkan manusia. Yakni ikan, cumi, keindahan alam. Sudah terjadi kesinambungan ekonomi baik bagi nelayan

■ Ke halaman 7

Tolak KIP (dari halaman 1)

maupun istrinya, serta dalam bidang pariwisata.

"Ibu-ibu nelayan juga memiliki kerjaan dari ikan yang tak terjual dengan mengolah jadi cemilan seperti pempek dan sebagainya, itu pernyataan warga yang saya baca sendiri di koran Babel Pos. Jika hanya berpatokan kepada timah, seperti daerah Papua, bagaimana kondisi masyarakat, apakah sejahtera? Seperti Bali di sana tidak ada tambang timah, tetapi masyarakatnya sejahtera dengan pariwisata. Anakah ada

Sementara kuasa dari nelayan Matras, Syamsu Budiman mengatakan, penolakan didasarkan karena dampak penambangan menyebabkan kerusakan global pada lingkungan, biota laut, karang-karang. Kondisi itu dianggap hanya akan merugikan nelayan pesisir yang melaut dengan perahu kecil berkapasitas mesin 3,5-5 PK dan tidak memiliki daya jangkau jauh. "Nelayan dengan perahu kecil tidak menjangkau jauh hanya di daerah tambang itu. Saya dapat keluhan, mereka menolak keras," sebutnya.

Ia berharap, sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai adanya kesejahteraan sosial harus terjadi keseimbangan. Harus ada kesejahteraan masyarakat, mengingat laut menyangkut "kenceng nasi" sebagai tempat mencari nafkah masyarakat nelayan. "Mereka ternyata banyak menolak, alasannya (wilayah KIP) zona tangkapan mereka itu. Apalagi dampaknya kita lihat banyak kerusakan. Recovery karang dalam 10 tahun mungkin tumbuh 10 cm, itu juga tempat tertentu kalau ada lumpur tidak bisa lagi," katanya.

Jangan di Matras?

Sementara, Ikrar Ramadhan selaku juru bicara Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Bangka, mengatakan penolakan yang terjadi adalah bentuk respon publik. Pihaknya mengapresiasi PT. Timah Tbk melakukan sosialisasi dengan terbuka untuk memperjelas berbagai isu tentang rencana operasi KIP di laut Matras.

"Kami setuju sosialisasi terbuka karena tersiar kabar 2 KIP 10 KIP dan mungkin nanti 20 KIP. Apalagi ada intimidasi kepada kawan-kawan di lapangan, apa mau dipecah belah. Harga pola pikir masyarakat menengah ke bawah yang sampai bilang, 'ku nek ditembak mati, ku dak terima,' sebut Ikrar yang menyampaikan informasi soal adanya pengancaman terhadap nelayan.

Pria yang aktif menggiring masyarakat untuk menolak KIP di laut Matras itu mengatakan, masyarakat sebenarnya sudah muak dengan perekonomian pertambangan di Babel. Selain itu pihaknya mengklaim telah mengumpulkan 3000 tanda tangan penolakan masuknya KIP di laut Matras.

"Silahkan melakukan pertambahan akan tetapi satu, jangan di Matras, Matras!" sebut Ikrar.

Ia juga mengingatkan, ketika KIP dipaksakan masuk ke laut Matras besar kemungkinan terjadi gejolak besar di Kabupaten Bangka sehingga sudah selayaknya dihindari.

Hal senada disampaikan Ketua Laskar Sekaban, M. Achin. Secara tegas Laskar Sekaban mendukung penolakan KIP di laut Matras. Selain itu pihaknya juga mengingatkan Matras sudah diatur sebagai tapak pariwisata dalam sebuah Perda Kabupaten Bangka.

"Kami dari Laskar Sekaban mendukung masyarakat menolak dan siap di depan. Parai dan Matras memiliki Perda tapak wisata, sampai sekarang DPRD belum mencajut. Intinya kami tidak setuju PT Timah menambang di Pantai Matras," tukas pria yang mengaku pegiat bidang sosial dan lingkungan ini.

Atas aspirasi warga yang mayoritas menolak tersebut, PT. Timah Tbk menyatakan akan menampung dan mendokumentasikan ke pimpinan. Perwakilan PT. Timah Tbk mengaku bukan sebagai pengambil kebijakan sehingga keputusan selanjutnya akan terlebih dahulu dibicarakan ke atasan.

Pertemuan sosialisasi KIP PT. Timah Tbk selain dihadiri ratusan warga juga sempat didatangi Sekda Bangka Fery Insani, hadir juga Kapolsek Sungailiat, KNPI Kabupaten Bangka, nelayan Deniang dan Aik Antu. (trh)

Pemuda Pancasila Tolak KIP Matras

SUNGAILIAT - Rencana beroperasinya 10 Kapal Isap Produksi (KIP) milik Mitra Usaha PT. Timah di Pantai Matras ditolak MPC Pemuda Pancasila.

"Hanya kerusakan yang akan terjadi jika KIP dibiarkan beroperasi di pantai Matras.

Belum beroperasi saja mereka telah menimbulkan pecah belah dan gejolak di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Matras. Jika dibiarkan tentu dapat memicu terjadinya konflik horizontal," tegas fungsionaris Pemuda Pancasila Bangka, Abdul Jalil dalam

relesnya kemarin (10/12).

Karena itu Pemuda Pancasila Bangka menghimbau kepada semua pihak terkait, khususnya masyarakat Matras dan sekitarnya agar jangan mau diadu domba. "Apapun bentuk kompensasi yang ditawarkan, akan habis dalam sekejap, dan

pada akhirnya lebih banyak mudharat yang akan terjadi dari pada manfaatnya," tegasnya. Menurutnya, walaupun PT. Timah merupakan perusahaan BUMN, namun yang merasakan secara langsung dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan

adalah masyarakat setempat, sementara Jakarta yang menikmati hasilnya.

"Kepada Pemkab Bangka kami mendesak agar meninjau ulang rekomendasi beroperasinya KIP di pantai Matras ini. Percuma saja pembuatan talud penahan abrasi yang

telah menghabiskan anggaran miliaran jika akan dihancurkan dalam sekejap dengan pembiaran penyedotan lapisan tanah di bawahnya, yang pasti membuat taludnya roboh. Atau hapuskan saja Pantai Matras sebagai destinasi pariwisata unggulan Bangka jika airnya sudah tidak dapat digunakan untuk berenang dan sebagai tempat rekreasi," ketusnya. (Rel/dee)



TOLAK KIP— Para nelayan bersama Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Bangka, Organisasi Pemuda Abdi Bangsa Kabupaten Bangka, memasang spanduk penolakan KIP di Pantai Matras. Foto diambil 12 November 2015 lalu.

Penolakan KIP Terus Bergulir

■ Minta Tidak Beroperasi di Teluk Kelabat dan Matras

SUNGAILIAT, BANGKA POS — Arus penolakan perencana PT Timah Tbk bersama mitra kerja untuk menambang timah di Teluk Kelabat, Belinyu dan Perairan Matras, Sungailiat semakin deras. Warga tidak ingin kapal isap produksi (KIP) beroperasi di perairan tersebut beroperasi.

Juru Bicara Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Bangka, Iwar, meyakini KIP tidak beroperasi di Perairan Matras.

Pernyataan ini menyikapi adanya isu KIP akan beroperasi di Perairan Matras pada hari Senin 14 Desember 2015.

"Kami mendengar aspirasi keluhan dan keresahan karena isu yang diberitakan itu. Kami mempertegas kembali seluruh pihak yang berkepentingan terutama PT Timah Tbk dan PT SIA bahwa masyarakat ini menolak dan jangan sampai terjadi beroperasi di Perairan Matras sehingga ada titik terang permasalahan ini," tegas Iwar, Senin (12/12).

Kontra ini.

Namun saya pertegas, kami dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Bangka yg mengorganisir gerakan #SaveMatras tetap pada komitmen awal. Tetap menolak segala perusahaan yang mau masuk ke perairan yang jernih, belum ada penambahan sedikitpun, yakni DPT2 Pemuda, Abdi Bangsa, Forum Pemuda Matras (FPM) dan Bo-S-S Muray Tiba, serta beberapa mahasiswa," jelas Ardi.

Menurutnya, jika ada tidak-publik selain empat di atas yang mengancam Aliansi pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Bangka dan

pergerakan #SaveMatras itu adalah pergerakan sipak, bukan pergerakan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Bangka.

Untuk penolakan perambangan di Teluk Kelabat, dituturkan Pemuda Muhammadiyah Babel melalui beres-beres jika masyarakat sampaikan aspirasi itu berarti masyarakat memiliki hak pengumpulan seribu sebab tanda tangan sebagai ungkapan rasa memiliki dan ingin selalu menjaga kelestarian ekosistem di perairan tersebut," tegas Idris yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka

Belitung (UBB).

Hal penting lainnya, jika Teluk Kelabat memiliki nilai ekonomi jangka panjang dalam sektor pariwisata. Menurutnya, pemerintah daerah berkewajiban menanganakan bahwa Bangka Belitung kedepan dibangun bukan lagi bermandar pada usaha melalain sektor pariwisata.

Sebelumnya, Sekretaris Dinasabean PT Timah Tbk Agung Nugroho membantah ada KIP yang sudah yang akan beroperasi di laut. Perencana akan tetap di wilayah Teluk Kelabat.

Memo di Agung untuk rencana operasi KIP di Teluk Kelabat sudah dilakukan sosialisasi sejak tahun 2014 lalu," tegas Idris.

UNIVERSITY

BANGKA

2 Kelompok Nelayan Naiki KIP

2 Kelompok

Sumbangan Halaman 1

SUNGAILIAT, BANGKA POS - Dua kelompok nelayan di Kabupaten Bangka (KIP) di Perairan Matras, Sungailiat, Kabupaten Bangka, sedang beraktivitas di pang perahu motor. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan tangkap nelayan setempat. Selain itu, kelompok nelayan terkait rencana pengoperasian KIP di perairan PT Timah Tbk sebagai perusahaan yang berencana membangun di per-

meminta empat KIP yang ada di perairan Matras segera dioperasikan. Kepala Kantor KIP di wilayah tangkap mereka.

"Intinya masyarakat menolak KIP itu karena mengganggu aktifitas nelayan," kata Syamsul, aki damai itu, empat KIP tersebut sudah bergeser, aksi damai nelayan itu minta agar KIP dipindahkan. Tapi kalau balik lagi mereka tidak menjamin, sekitarnya akan berlanjut.

Sebelum puluhan nelayan Airantu menyukseskan KIP, Syamsul mengaku sudah mewaspadakan masyarakat sekitar. "Kita sudah bertolak belakang. Disampaikan, tindakan amarkis tidak akan menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah baru."

Usai Mengunjungi Kapolres Kantor Polres Bangka, Mereteke menemui Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana.

"Kami datang kemari (Kantor Polres Bangka) untuk menyampaikan aspirasi nelayan Matras mendampingi Kantor Polres Bangka. Mereteke menemui Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana.

"Kami sudah kemari untuk menyampaikan aspirasi nelayan Matras mendampingi Kantor Polres Bangka. Mereteke menemui Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana.

nah, malah tanya jawabnya ke nelayan, saya anggap itu sebagai bentuk komunikasi yang baik," kata Syamsul. Kepala KIP di wilayah tangkap mereka.

Fit Bor mengatakan masyarakat nelayan pesisir menolak aktifitas KIP karena mengganggu aktifitas nelayan. "Kami sudah sampaikan ke PT Timah Tbk soal perizinan segala macam bukankah kewenangan kami," ungkap Fery.

Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana mengatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka AKBP Sekar Maulana mengatakan masyarakat nelayan menolak keberadaan operasional KIP di Perairan Pantai Matras karena kawasan tersebut kawasan wisata. Namun, pemerintah juga tak bisa berbuat banyak.

"Karena ada lebih di atasnya. Selain itu juga terkait dengan sektor lainnya seperti pertambangan, perikanan, lingkungan hidup," kata Fery.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Hendra Yunus, menyampaikan hal serupa. "Kita akui daerah kita ditakdirkan di daerah pertambangan. Perikanan dan pertambangan dampaknya pasti rusak. Namanya daerah tambang, ditakdirkan tapi semua itu akan ada aturannya. Tapi semua itu akan ada aturannya. Tapi semua itu akan ada aturannya."

mengkomunikasikan dengan masyarakatlah, kata Syamsul. Kepala KIP di wilayah tangkap mereka.

Fit Bor mengatakan masyarakat nelayan pesisir menolak aktifitas KIP karena mengganggu aktifitas nelayan. "Kami sudah sampaikan ke PT Timah Tbk soal perizinan segala macam bukankah kewenangan kami," ungkap Fery.

Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana mengatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka AKBP Sekar Maulana mengatakan masyarakat nelayan menolak keberadaan operasional KIP di Perairan Pantai Matras karena kawasan tersebut kawasan wisata. Namun, pemerintah juga tak bisa berbuat banyak.

"Karena ada lebih di atasnya. Selain itu juga terkait dengan sektor lainnya seperti pertambangan, perikanan, lingkungan hidup," kata Fery.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Hendra Yunus, menyampaikan hal serupa. "Kita akui daerah kita ditakdirkan di daerah pertambangan. Perikanan dan pertambangan dampaknya pasti rusak. Namanya daerah tambang, ditakdirkan tapi semua itu akan ada aturannya. Tapi semua itu akan ada aturannya."

meminta empat KIP yang ada di perairan Matras segera dioperasikan. Kepala Kantor KIP di wilayah tangkap mereka.

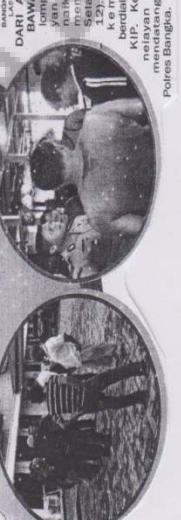
"Intinya masyarakat menolak KIP itu karena mengganggu aktifitas nelayan," kata Syamsul, aki damai itu, empat KIP tersebut sudah bergeser, aksi damai nelayan itu minta agar KIP dipindahkan. Tapi kalau balik lagi mereka tidak menjamin, sekitarnya akan berlanjut.

Sebelum puluhan nelayan Airantu menyukseskan KIP, Syamsul mengaku sudah mewaspadakan masyarakat sekitar. "Kita sudah bertolak belakang. Disampaikan, tindakan amarkis tidak akan menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah baru."

Usai Mengunjungi Kapolres Kantor Polres Bangka, Mereteke menemui Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana.

"Kami sudah kemari (Kantor Polres Bangka) untuk menyampaikan aspirasi nelayan Matras mendampingi Kantor Polres Bangka. Mereteke menemui Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana.

■ Selama (15/12), dua kelompok nelayan datang dengan empat KIP di Perairan Pantai Matras-Sungailiat. ■ Mereka datang berpelambing. Kelompok pertama nelayan Matras Sungailiat. Tindakan serupa dilakukan kelompok nelayan Airantu, Desa Deniang, Riuuslup. ■ Mereka menolak kehadiran KIP. ■ Aksi menolak nelayan Matras berlanjut dengan mendatangi Kantor KIP di Perairan Pantai Matras-Sungailiat. ■ Mereka mengadu ke Kapolres tentang kehadiran KIP.



Ke halaman 11

Ramai-ramai ke KIP

■ Selama (15/12), dua kelompok nelayan datang dengan empat KIP di Perairan Pantai Matras-Sungailiat. ■ Mereka datang berpelambing. Kelompok pertama nelayan Matras Sungailiat. Tindakan serupa dilakukan kelompok nelayan Airantu, Desa Deniang, Riuuslup. ■ Mereka menolak kehadiran KIP. ■ Aksi menolak nelayan Matras berlanjut dengan mendatangi Kantor KIP di Perairan Pantai Matras-Sungailiat. ■ Mereka mengadu ke Kapolres tentang kehadiran KIP.

■ Mereka datang berpelambing. Kelompok pertama nelayan Matras Sungailiat. Tindakan serupa dilakukan kelompok nelayan Airantu, Desa Deniang, Riuuslup. ■ Mereka menolak kehadiran KIP. ■ Aksi menolak nelayan Matras berlanjut dengan mendatangi Kantor KIP di Perairan Pantai Matras-Sungailiat. ■ Mereka mengadu ke Kapolres tentang kehadiran KIP.

BANGKA POS/STAFF
DARI ATAS KE BAWAH - Kegiatan kelompok nelayan naik kapal di KIP. ■ Kelompok nelayan KIP setempat didampingi oleh Kapolres Riuuslup. ■ Aksi menolak kehadiran KIP. ■ Nelayan Matras mendatangi Kantor KIP di Perairan Pantai Matras-Sungailiat.

Peringatan nelayan, lanjut Syamsul, dituntut pemerintah untuk segera mengoperasikan KIP. "Kita sudah bertolak belakang. Disampaikan, tindakan amarkis tidak akan menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah baru."

Usai Mengunjungi Kapolres Kantor Polres Bangka, Mereteke menemui Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana.

"Kami sudah kemari (Kantor Polres Bangka) untuk menyampaikan aspirasi nelayan Matras mendampingi Kantor Polres Bangka. Mereteke menemui Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Hendra Yunus, menyampaikan hal serupa. "Kita akui daerah kita ditakdirkan di daerah pertambangan. Perikanan dan pertambangan dampaknya pasti rusak. Namanya daerah tambang, ditakdirkan tapi semua itu akan ada aturannya. Tapi semua itu akan ada aturannya."

mengkomunikasikan dengan masyarakatlah, kata Syamsul. Kepala KIP di wilayah tangkap mereka.

meminta empat KIP yang ada di perairan Matras segera dioperasikan. Kepala Kantor KIP di wilayah tangkap mereka.

"Intinya masyarakat menolak KIP itu karena mengganggu aktifitas nelayan," kata Syamsul, aki damai itu, empat KIP tersebut sudah bergeser, aksi damai nelayan itu minta agar KIP dipindahkan. Tapi kalau balik lagi mereka tidak menjamin, sekitarnya akan berlanjut.

Sebelum puluhan nelayan Airantu menyukseskan KIP, Syamsul mengaku sudah mewaspadakan masyarakat sekitar. "Kita sudah bertolak belakang. Disampaikan, tindakan amarkis tidak akan menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah baru."

Usai Mengunjungi Kapolres Kantor Polres Bangka, Mereteke menemui Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana.

"Kami sudah kemari (Kantor Polres Bangka) untuk menyampaikan aspirasi nelayan Matras mendampingi Kantor Polres Bangka. Mereteke menemui Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana.

KIP di Matras Meresahkan!

SUNGAILIAT - Pemuda Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat kembali secara tegas menolak masuknya Kapal Isap Produksi (KIP) yang sudah terjadi beberapa hari ini. Pendakanya itu salah satunya disampaikan Riesta Praditya dengan berbagai pertimbangan atas pengamatan selama ini.

Riesta Praditya yang akrab disapa Mandor ini mengatakan, keberadaan KIP sudah jelas meresahkan warga khususnya nelayan serta mengganggu pengunjung Pantai Matras. Selain itu, keberadaan warga Matras terutama nelayan jauh lebih dulu ada dibandingkan aktivitas penambangan timah di laut Matras.

"KIP hanya merusak laut, ganggu nelayan, mengganggu pengunjung pantai, PT Timah ne keyeye, la tau masyarakat menolak tapi agik la operasi. Kate mereka Matras la dari 300 tahun lalu jadi tempat tambang, tapi sebenarnya kata bapak kami sudah dari sebelum ada kalender Matras sudah jadi tempat nelayan Matras nyari ikan," keluhnya kepada Babel Pos, kemarin (16/12).

Mandor yang mengaku dibesarkan dari hasil tangkapan ikan karena orang tuanya nelayan, menolak keras keberadaan KIP maupun penambangan laut lainnya di perairan Matras. Pesisirnya, setelah masuk KIP hanya membuat masyarakat menjadi resah dengan gejala sosial bertambah besar. "Masyarakat jadi resah gejala tambah besar, pantai jadi sepi pengunjung. Aik laut jadi kepoib, mane bising suara KIP sampai ke rumah kami. Nelayan juga mogok ngelaut sekarang," sebutnya. Untuk itu ia meminta KIP tidak beroperasi di laut Matras ataupun sekedar parkir. Keberadaan Matras telah dibangun untuk pariwisata mestinya lebih ditingkatkan lagi pengembangannya agar menarik minat pengunjung, bukan malah ditambang timah dengan KIP. "Kalau perlu pariwisata di Matras dibangun la, biar seperti pantai-pantai di Lombok. Biar pengunjungnya banyak. Keindahan alam pantai Matras ini dilestarikan, baik di darat maupun laut dilestarikan. Biar indah alam kita ni, nelayan juga nyaman kalau mau melaut," pungkasnya. (trb)



KIP Diminta Tak Kembali ke Matras

SUNGAILIAT - Walau kemarin Kapal Isap Produksi (KIP) mulai menjauh dari perairan laut Pantai Matras, tapi dukungan penolakan terus meluas. Setelah para nelayan dan berbagai elemen masyarakat menyatakan menolak KIP tanpa negosiasi, kembali datang lagi seruan penolakan dari Pemuda Komunitas D'jaba Sungailiat yang peduli terhadap lingkungan.

Rendy dari Pemuda Komunitas D'jaba yang sejak awal mengawal penolakan KIP di Pantai Matras terus melakukan pemantauan dari dekat, bahkan hingga kemarin petang. Rendy mengatakan sangat prihatin atas pengoperasian KIP di Matras dalam situasi penolakan meluas.

"KIP ini sudah semacam monster laut yang 'sebasing radok' kalau kata org Bangka. Sudah tidak memikirkan Dampak berkepanjangan di masa yang akan datang, sudah tau itu tempatnya pariwisata malah dihancurkan, mau jadi apa pariwisata di Bangka ini kalau sudah rusak dan hancur lebur karena ulah-ulah KIP itu," sebut Rendy yang sempat memantau dari Bukit Matras kemarin sore (17/12).

Menurutnya, bila terus dilakukan masuknya KIP di Matras hanya akan membuat pariwisata Kabupaten Bangka "jalan jongkok". Sangat disayangkan pantai-pantai yang indah harus diobrak-abrik lagi oleh KIP. Padahal aset wisata di Bangka banyak sekali untuk potensial dikembangkan.

"Apalagi kalau dulunya, jangan ditanya keindahannya. Saya yang doyan snorkling di bibir-bibir pantai dulunya sangat puas akan keindahan karang dan biota-biota laut yang ada. Contoh kecilnya di Pantai Trun Aban, Marina Bay, sama pantai Batu Bedaun yang ada batu besar, tidak jauh dari tepian pantai," sebutnya.

Namun sekarang, jangan snorkling, untuk mandi pantai saja rasanya malas. "Jengkel ngelietin kapal isap dan kapal keruk

yang kemarin-kemarin beroperasi laut Matras. Selain tidak bisa snorkling karena airnya keruh dan ombaknya semakin tidak tenang, saya pun merasa parno atau takut kalau mau snorkling, liat saja sikon airnya (kotor) seperti itu," tandasnya.

Selain itu, dampak yang akan ditimbulkan oleh KIP membuat nelayan-nelayan kecil jadi tidak semangat melaut karena hasil tangkapnya semakin berkurang. Pasalnya limbah dari KIP tersebut merusak keadaan laut yang menjadi lahan mencari nafkah bagi nelayan.

"Dulu saya ke pantai Batu Bedaun gak sengaja nanya ke salah satu bapak-bapak yang berprofesi nelayan kecil, kenapa dia tidak melaut. Nelayan itu menjawab spontan, selama masih ada kapal isap dan kapal keruk di kawasan ini saya melaut hanya cuma ngabisin ransum, minyak bensin dan rokok, hasil tangkapnya tidak sesuai." jelas Rendy yang bergabung juga ke Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Bangka dalam gerakan menolak KIP di Matras.

Untuk itu ia berharap KIP benar-benar jauh dari laut Matras agar tidak mengganggu pemandangan dan merusak area tangkap nelayan. Pemerintah pun diminta lebih memikirkan pariwisata dan mendukung program-program yang berkaitan dengan pariwisata.

"Karena pariwisata di Bangka ini saya lihat sangat menjanjikan, saya yakin banyak masyarakat, pemuda pemudi yang terampil dan kreatif di bidang kesenian, kerajinan tangan. Termasuk dalam pengolahan makanan ringan khas Bangka, cinderamata yang bisa dibawa pulang turis-turis asing ke sini berkunjung ke Bangka. Saya akui Bangka ini sudah jauh tertinggal sama Belitung karena di sana pariwisatanya sangat didukung dan jelas terbukti, di sana juga tidak ada yang namanya aktivitas KIP dan kapal keruk," pungkasnya. (trh)

Matras Bukan Punya Warga Matras Saja

SUNGAILIAT - Komunitas pencinta lingkungan yang tergabung dalam Himpunan Pencinta Alam (Himpa) "Pucuk Idat" Kabupaten Bangka, ikut menyayangkan adanya rencana tambang laut di perairan Pantai Matras Sungailiat. Pihaknya menayangkan keluarinya izin pertambangan yang dinilai sangat mengganggu kelestarian alam tersebut.

"Matras itu maaf omongnya bukan punya warga Matras saja, tapi kita semua di Kabupaten Bangka. Kita minta semua pihak tidak berfikir pendek lah, karena dengan penambangan itu akan merusak lingkungan dalam jangka waktu lama," kata Ketua Himpa "Pucuk Idat" Kabupaten Bangka, Alamsyah, kemarin (20/12). Menurut Alamsyah, semua pihak harus secara jelas memikirkan jauh kedepan atas kondisi yang ada saat ini. Kelestarian

lingkungan sangat penting bagi keseimbangan hidup umat manusia serta makhluk hidup lainnya. Apalagi pertambangan adalah sumberdaya alam tidak dapat diperbaharui.

Jangan istilahnya ini di-onggong persulit sepele dan remeh. Kita mikinya ke depan, harus jelas sasarnya. Ini tiba-tiba ada izin, kita sebagai masyarakat tidak tau, kenapa pemerintah mengeluarkan izin itu. Kita tau apa untung dan ruginya namun yang pasti mengancam kelestarian lingkungan," tegas Alamsyah.

Ditegaskannya, apapun yang terjadi dengan masuk atau tidak masuknya tambang di laut Matras dan dimanapun dalam wilayah Kabupaten Bangka, pihaknya akan mengkritisi setiap kerusakan yang ada. Pihaknya juga merangkul komunitas pencinta alam yang ada di Kabupaten Bangka khususnya serba Pulau Bangka

umumnya untuk ikut peduli akan nasib Pantai Matras karena hendak dimasuki KIP (Kapal Isap Produksi).

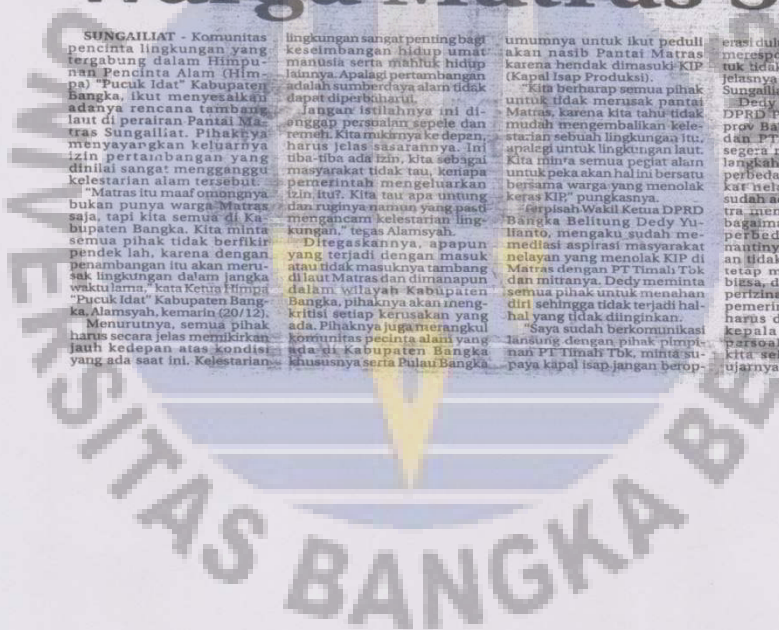
"Kita berharap semua pihak untuk tidak merusak pantai Matras, karena kita tahu tidak mudah mengembalikan kelestarian sebuah lingkungan itu, apalagi untuk lingkungan laut. Kita minta semua pegiat alam untuk peka akan hal ini bersatu bersama warga yang menolak keras KIP" pungkasnya.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Dedy Yulianto, mengaku sudah memediasi aspirasi masyarakat nelayan yang menolak KIP di Matras dengan PT Timah Tbk dan mitranya. Dedy meminta semua pihak untuk menahan diri sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Saya sudah berkomunikasi langsung dengan pihak pimpinan PT Timah Tbk, minta supaya kapal isap jangan berop-

erasi dulu, dan pihak PT Timah merespon menyanggapi untuk tidak beroperasi dahulu," jelasnya kepada wartawan di Sungailiat Minggu (20/12).

Dedy juga mengharapkan DPRD Provinsi Babel, Pemprov Babel, Pemkab Bangka dan PT Timah Tbk, dapat segera mengambil langkah-langkah untuk menyatukan perbedaan diantara masyarakat nelayan. "Sekarang ini sudah ada yang pro dan kontra menyikap masalah ini, bagaimana kita menyatukan perbedaan ini, sehingga nantinya masyarakat nelayan tidak terganggu dan bisa tetap mencari ikan seperti biasa, dan di sisi lain proses perizinan sudah dikeluarkan pemerintah daerah, jadi ini harus diselesaikan dengan kepala dingin, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan bersama," ujarnya. (dee/trh)



BAHASA BELAKANG GIKAPOS

MANAGED BY **Tribun**

Serumpun Sebalai

RABU, 30 DESEMBER 2015 • NOMOR 212 TAHUN XVII



VIDEO:
 Massa Gelar
 Demo di Kantor
 Gubernur Babel



POKOK POKOKNYA JUMADI
 Rotusan warga
 mendatangi Kantor
 Gubernur Bangka
 (29/12). Mereka
 menyampaikan
 aspirasi dan
 melaporkan
 Gubernur Rustom
 dan Gubernur
 untuk mencabut
 izin penambangan
 laut.

Lampiran 6

Curriculum Vitae



A. Data Pribadi

- Nama : NURANISYAH
- Tempat, Tanggal Lahir : Sungailiat, 18 Mei 1995
- Alamat : JL. Kapt. Soiraiman 1 No. 02 Sri Pemandang, Kecamatan Sungailiat.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Status : Belum Menikah
- Nama Ayah : G. Effendi
- Nama Ibu : Rostina

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 3 Sungailiat tahun 2007
- SMP Negeri 1 Pemali Tahun 2010
- Madrasah Aliyah Negeri Sungailiat Tahun 2013

